



Penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi Berdasarkan Perspektif *HOT-FIT Framework*

Implementation of SIPD RI in Bappelitbangda of Bekasi City Based on the HOT-FIT Framework Perspective

Zahra Amelia¹, Dewi Noor Azijah², Lolita Deby Mahendra^{3*}

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
2110631180128@student.unsika.ac.id, dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id,
lolita.deby@fisip.unsika.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD RI) di Bappelitbangda Kota Bekasi berdasarkan perspektif *HOT-Fit framework*. Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta telaah regulasi dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tiga dimensi utama *HOT-Fit*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek *human*, penggunaan SIPD RI telah menjadi alat bantu dalam pekerjaan sehari-hari, salah satunya dalam pengelolaan keuangan daerah, namun masih terdapat kesenjangan kompetensi. Pada aspek *organization*, terdapat komitmen dan dukungan kebijakan pimpinan, tetapi dukungan teknis internal belum optimal. Pada aspek *technology*, sistem ini mempermudah penginputan dan penyajian data, namun masih terbatas dalam integrasi dengan aplikasi daerah lain seperti SIPD Kota Bekasi, rentan gangguan jaringan, serta memiliki fitur pelaporan yang belum memadai. Kesimpulannya, penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi telah sejalan dengan regulasi dan mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah, tetapi masih memerlukan penguatan SDM, koordinasi organisasi, dan pengembangan sistem untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kata kunci: *E-Government*; *HOT-FIT*; Keuangan; Penerapan; SIPD RI

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Indonesian Regional Government Information System (SIPD RI) in the Bekasi City Development Planning Agency (Bappelitbangda) based on the HOT-Fit framework perspective. The method used is a descriptive case study with a qualitative approach through interviews, observations, documentation, and review of regulations and official documents. Data analysis was carried out through the stages of reduction, presentation, and conclusion drawing based on the three main dimensions of HOT-Fit. The results of the study show that in terms of human resources, the use of SIPD RI has become a tool in daily work, one of which is in regional financial management, but there is still a competency gap. In terms of organization, there is commitment and policy support from leaders, but internal technical support is not yet optimal. In terms of technology, the system facilitates data entry and presentation, but it is still limited in its integration with other regional applications, is prone to network disruptions, and has inadequate reporting features. In conclusion, the implementation of SIPD RI at Bappelitbangda Kota Bekasi is in line with regulations and promotes transparency in regional financial management, but it still requires strengthening of human resources, organizational coordination, and system development to improve its effectiveness.

Keywords: *E-Government*; *HOT-FIT*; Finance; Implementation; SIPD RI

I. PENDAHULUAN

Pada era digital, teknologi informasi telah menjadi sumber daya strategis yang tidak hanya mendukung operasional, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing, efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan organisasi, termasuk sektor pemerintahan (Mulyadi & Choliq, 2017; Heriyanto, 2022). Pemerintah Indonesia merespons kebutuhan tersebut melalui kebijakan *e-government* yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *E-government* adalah istilah yang merujuk pada pemerintahan yang memanfaatkan teknologi berbasis internet untuk menyempurnakan serta meningkatkan program dan pelayanan mereka (Ahady et al., 2025). Penerapan *e-government* merupakan langkah nyata yang diharapkan mampu memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai implementasi *e-government*, lahirlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD RI merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data pembangunan, keuangan, dan administrasi pemerintahan. Sistem ini bertujuan menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan menyediakan data terintegrasi secara nasional (Manoe et al., 2023). Aplikasi ini memiliki cakupan modul perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan demikian, SIPD RI diharapkan mampu mendukung pengendalian anggaran pemerintah daerah, memperkuat sistem perencanaan pembangunan, serta mengurangi potensi penyimpangan (Nasution & Nurwani, 2021).

SIPD RI pada konteks *e-government* memungkinkan integrasi data antar instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga memudahkan koordinasi, perencanaan, serta pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat dan terkini. Selain itu, penerapan SIPD RI diharapkan mampu mendukung pengendalian anggaran pemerintah daerah sekaligus memperkuat sistem yang menunjang perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah di masa mendatang (Triwahyuni & Fatmawati, 2024). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa SIPD RI berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik melalui penyediaan data yang dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan.

Walaupun memiliki manfaat strategis, penerapan SIPD RI di berbagai daerah masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan jaringan, kendala teknis, serta rendahnya penguasaan aparatur terhadap fitur aplikasi (Firdaus & Cholik, 2024; Arif & Firmansyah, 2024). Kondisi serupa juga terjadi di Kota Bekasi, di mana Bappelitbangda telah mengimplementasikan SIPD RI pada tahun anggaran 2024 yang diperkuat dengan aplikasi pendamping SIPD Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 900.1/KEP.44-BPKAD/1/2024.

Hasil wawancara pra-penelitian menunjukkan masih terdapat hambatan berupa akses sistem yang lambat, gangguan akibat tingginya jumlah pengguna, serta keterbatasan kompetensi pegawai yang masih beradaptasi dengan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SIPD RI tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, dukungan organisasi, serta kebijakan internal yang sejalan dengan regulasi pusat dan tuntutan pemangku kepentingan eksternal.

Evaluasi penerapan SIPD RI penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat, baik dari aspek manusia, organisasi, maupun teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis penerapan SIPD RI di Sub Bagian Keuangan Bappelitbangda Kota Bekasi dengan menggunakan *Human-Organization-Technology Fit (HOT-Fit) Framework* Yusof et al. (2008), yang memandang keberhasilan sistem informasi ditentukan oleh kesesuaian antara *human* (manusia), *organization* (organisasi), dan *technology* (teknologi).

Human Organization Technology (HOT-Fit) merupakan salah satu model evaluasi yang mempunyai tiga aspek penting pada penerapan sistem informasi, diantaranya *human*, *organization*, dan *technology*. Kerangka kerja *HOT-Fit* adalah salah satu kerangka teori yang dikembangkan oleh Yusof et al. (2008) untuk menilai keberhasilan implementasi suatu sistem informasi. *HOT-Fit* adalah kerangka evaluasi yang menilai keberhasilan sistem informasi dari tiga aspek utama: (1) *Human* (manusia), mencakup penggunaan sistem dan kepuasan pengguna; (2) *Organization* (organisasi), meliputi dukungan struktur, kebijakan internal, pola koordinasi, serta pengaruh faktor eksternal seperti regulasi dan politik; dan (3) *Technology* (teknologi), yang mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan (Tawar et al., 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan SIPD RI dalam pengelolaan keuangan daerah di beberapa instansi pemerintahan. Namun, studi yang secara khusus menelaah penerapan SIPD RI di Sub Bagian Keuangan Bappelitbangda Kota Bekasi masih belum ditemui. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian, terutama terkait bagaimana kebijakan internal organisasi berimplikasi terhadap penerapan SIPD RI dalam kerangka regulasi pusat dan tekanan pemangku kepentingan eksternal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan teori *HO-Fit* dalam menganalisis penerapan SIPD RI di Sub Bagian Keuangan Bappelitbangda Kota Bekasi sekaligus menjadi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Fokus penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai penerapan SIPD RI di Kota Bekasi, tetapi juga menawarkan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat kebijakan internal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan sistem agar sejalan dengan tuntutan regulasi dan kebutuhan pemangku kepentingan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi berdasarkan perspektif *HOT-Fit Framework*. Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Yin (2018) yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh dan empiris mengenai suatu fenomena dalam konteks nyata. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap dinamika penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung maupun penghambat keberhasilannya berdasarkan perspektif *HOT-Fit Framework*.

Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam konteks penelitian kualitatif data tersebut didapatkan dari informan penelitian (Wekke, 2019). Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan narasumber terkait penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi. Sementara itu, data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, baik berupa dokumen resmi, catatan pribadi, maupun publikasi dari berbagai lembaga (Wekke, 2019). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang mencakup artikel jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, internet, serta publikasi data lainnya yang relevan dengan penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi berdasarkan perspektif *HOT-Fit Framework*.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan melalui observasi nonpartisipan, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas sehari-hari subjek penelitian dan hanya bertindak sebagai pengamat independen (Wekke, 2019). Observasi difokuskan pada penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi, khususnya di Sub Bagian Keuangan.

Selain itu, wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang bersifat terbuka dengan alur diskusi menyesuaikan pedoman wawancara yang telah disusun, yang berfokus pada penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi berdasarkan perspektif *HOT-Fit Framework*. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak empat orang yang dinilai memiliki relevansi dan informasi yang valid terkait penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan

pada pertimbangan tertentu agar informan yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mampu memberikan data yang relevan.

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah dokumentasi, yang dipahami sebagai catatan mengenai peristiwa yang telah berlangsung (Wekke, 2019). Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung data primer, dengan sumber berupa buku, artikel jurnal, serta regulasi yang relevan dengan penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui (1) reduksi data dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, mengelompokkan, serta mengorganisasi data secara terstruktur untuk memfokuskan pada hal-hal penting sesuai permasalahan penelitian, (2) penyajian data yang dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti uraian singkat, tabel, maupun grafik, dan (3) penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah diolah dan dianalisis, sehingga menghasilkan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Teknik Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dengan cara membandingkannya dengan sumber lain di luar data yang diperoleh (Wekke, 2019). Secara sederhana, triangulasi berfungsi untuk memverifikasi kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji melalui tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi peneliti, dan triangulasi metodologis. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data lain yang relevan, sehingga kebenaran informasi dari seorang informan dapat dipastikan melalui berbagai metode dan sumber data. Selanjutnya, triangulasi peneliti dilakukan dengan pengecekan data secara mandiri oleh peneliti untuk menjamin kesesuaian dan relevansi informasi yang diperoleh dengan tujuan penelitian. Adapun triangulasi metodologis dilakukan dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data guna menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan memberikan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dibangun karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengidentifikasi sejumlah permasalahan, antara lain belum tersedianya basis data yang kuat sebagai dasar analisis perencanaan, sulitnya memperoleh data pembangunan daerah secara nasional akibat tidak adanya kompilasi dan integrasi antara pusat dan daerah, serta belum adanya standarisasi dalam kodifikasi dan nomenklatur perencanaan maupun keuangan daerah. Selain itu, penggunaan berbagai platform sistem informasi oleh masing-masing daerah menyulitkan proses integrasi, informasi

perencanaan dan keuangan masih terpisah sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan, serta proses perencanaan dan penganggaran di daerah yang belum tepat waktu. Permasalahan tersebut mendorong kebutuhan akan sebuah portal sistem terpadu yang dapat membantu daerah dalam penyusunan perencanaan dan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, sekaligus mengintegrasikan data daerah secara nasional (Nakii et al., 2023). Atas dasar itulah SIPD kemudian dikembangkan sebagai solusi untuk menjawab permasalahan tersebut.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) di Bappelitbangda Kota Bekasi mulai diberlakukan penuh pada tahun 2025 setelah melalui masa transisi sejak 2024. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan diperkuat dengan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Surat Edaran Nomor: 900.7140-BPKAD.Set Tahun 2024 mengenai Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD RI, khususnya modul penatausahaan dan modul akuntansi pelaporan, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan utama penerapan SIPD RI adalah mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang seragam, transparan, dan akuntabel.

1. Human (Manusia)

Aspek *human* (manusia) dalam teori *HOT-Fit* mencakup penggunaan sistem (*system use*) dan kepuasan pengguna (*user satisfaction*).

a. System Use

Berdasarkan kerangka *HOT-Fit*, penggunaan sistem (*system use*) mencerminkan keterlibatan aktif pengguna dalam memanfaatkan sistem informasi, baik dari sisi frekuensi, kualitas interaksi, maupun kesadaran dan kemauan individu. Dalam konteks Bappelitbangda Kota Bekasi, pengguna SIPD RI tidak hanya ditentukan berdasarkan jabatan struktural, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi teknis serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pegawai. Sesuai dengan teori *HOT-Fit*, keterlibatan pengguna tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan dan kemampuan teknis dalam memahami serta mengoperasikan sistem. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem sudah menjadi bagian dari aktivitas formal organisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penggunaan SIPD RI menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan teknis, sehingga pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis menjadi strategi utama untuk meningkatkan kapasitas pegawai. Berdasarkan perspektif *HOT-Fit*, kondisi tersebut mencerminkan adanya keterkaitan antara pelatihan yang diberikan oleh organisasi dengan kesiapan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Selain itu, motivasi serta pengalaman dalam menggunakan sistem turut menjadi faktor

penting yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan SIPD RI. Motivasi dan pengalaman penggunaan sistem juga turut memengaruhi efektivitas pemanfaatan SIPD RI, di mana pegawai yang adaptif dan memiliki dorongan belajar cenderung lebih cepat menguasai sistem dibandingkan pegawai yang kurang siap terhadap perubahan.

Dari sisi manfaat, SIPD RI terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja, terutama dalam hal percepatan proses input data dan pelaporan yang terdokumentasi secara otomatis. Efisiensi ini menjadi salah satu bentuk manfaat fungsional (*perceived usefulness*) yang dapat mendorong penggunaan sistem secara konsisten dan berkualitas. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kompleksitas sistem yang lebih tinggi dibandingkan aplikasi sebelumnya, kebutuhan validasi data lintas bidang di BPKAD yang memperpanjang alur kerja, serta perbedaan tingkat kesiapan dan motivasi pegawai, khususnya yang kurang familiar dengan teknologi digital.

Secara keseluruhan, penggunaan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi telah berjalan sesuai struktur kerja dan tupoksi organisasi, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan individu, kompleksitas teknis, serta dukungan organisasi. Oleh karena itu, efektivitas *system use* dapat terus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi antar bidang, serta pendekatan yang mendorong motivasi dan adaptasi pegawai dalam menghadapi transformasi digital.

b. User Satisfaction

Dalam kerangka *HOT-Fit*, kepuasan pengguna mencerminkan persepsi subjektif individu terhadap kualitas pengalaman mereka ketika menggunakan sistem informasi. Pada konteks Bappelitbangda Kota Bekasi, kepuasan pengguna terhadap SIPD RI terlihat bervariasi, dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan serta kendala teknis yang dihadapi dalam praktik sehari-hari.

Sebagian besar pegawai menilai bahwa SIPD RI telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini dinilai praktis, mudah dipahami, dan mampu mempercepat proses kerja, sehingga memberikan rasa terbantu dalam pelaksanaan tugas. Kemudahan penggunaan (*ease of use*) menjadi faktor yang paling dominan dalam membentuk persepsi positif pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa secara fungsional, SIPD RI telah mampu meningkatkan efisiensi kinerja dan memudahkan proses input maupun pelaporan data.

Meskipun SIPD RI memiliki akses yang mudah dan fleksibel, aplikasi ini sering mengalami gangguan pada jam kerja dan cenderung lebih lancar digunakan pada malam hari. Kondisi tersebut terjadi karena SIPD RI masih tergolong aplikasi baru yang sedang dalam tahap perbaikan serta penambahan fitur (Pramono & Eprilianto, 2025). Alur validasi data lintas bidang di BPKAD juga menjadi hambatan yang sering dirasakan. Hambatan tersebut menyebabkan proses kerja memakan waktu lebih lama dibandingkan harapan pengguna, sehingga memengaruhi persepsi kepuasan secara keseluruhan.

Dari sisi kelengkapan fitur, SIPD RI juga dinilai masih dalam tahap pengembangan. Jika dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya, yaitu SIPD Kota Bekasi, SIPD RI belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna karena beberapa menu masih terbatas dan belum stabil. Hal ini membuat sebagian pegawai menilai bahwa SIPD RI hanya memberikan kepuasan pada level cukup, meskipun mereka tetap mengakui adanya manfaat nyata dari penggunaan sistem ini.

Meskipun demikian, terdapat keyakinan bahwa SIPD RI memiliki potensi besar untuk terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas sistem maupun manfaat jangka panjangnya. Penggunaan satu sistem terpadu memungkinkan integrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah secara elektronik, sehingga satu kali input dapat menghasilkan berbagai output laporan yang dibutuhkan. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna apabila hambatan teknis berhasil diminimalisasi.

Berdasarkan kerangka *HOT-Fit*, kepuasan pengguna erat kaitannya dengan kualitas sistem, informasi, dan layanan (Tawar et al., 2022). Dengan demikian, upaya perbaikan kecepatan *server*, penyempurnaan fitur, serta peningkatan koordinasi antar bidang menjadi faktor krusial untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan pengguna SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi sudah menunjukkan arah yang positif, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek teknis dan fungsional agar dapat memberikan pengalaman yang lebih optimal dan mendukung keberhasilan penerapan sistem.

2. Organization (Organisasi)

HOT-Fit framework menyatakan bahwa aspek *organization* terdiri atas dua dimensi utama, yaitu *structure* dan *environment*, yang secara bersama-sama memengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi seperti SIPD RI.

a. Structure (Struktur)

Dalam kerangka *HOT-Fit*, struktur organisasi memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan penerapan sistem informasi, karena mencakup pola komunikasi, proses koordinasi antarunit, serta mekanisme formal yang menjaga arah dan keberlanjutan sistem. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi tidak secara langsung mengubah struktur organisasi secara formal. Namun, sistem ini telah memberikan dampak fungsional dengan mendukung pelaksanaan tugas unit kerja, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan proses administrasi keuangan. Berdasarkan kerangka *HOT-Fit*, hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara struktur organisasi yang sudah ada dengan fungsi teknologi baru, sehingga sistem dapat diadopsi tanpa menimbulkan disrupsi.

Selain itu, SIPD RI berperan sebagai instrumen yang memperkuat efisiensi kerja dan mendorong koordinasi antarbagian melalui proses digitalisasi. Meskipun struktur organisasi tidak mengalami perubahan resmi, alur kerja dan

mekanisme koordinasi menjadi lebih terhubung dan terintegrasi melalui sistem, sehingga memungkinkan penyelesaian pekerjaan antarbagian secara lebih efektif. Pada teori *HOT-Fit*, hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi memiliki daya serap yang baik terhadap fungsi sistem informasi.

Dukungan pimpinan juga menjadi dimensi penting dari aspek struktur dalam penerapan SIPD RI. Bentuk dukungan ini tidak hanya berupa persetujuan formal, tetapi juga ditunjukkan melalui koordinasi aktif, arahan strategis, monitoring, dan pengawasan teknis. Dukungan pimpinan dipandang sebagai faktor penguat yang memberikan legitimasi dan motivasi bagi pegawai dalam menggunakan sistem, serta menjamin implementasi sesuai dengan kebijakan pusat. Hal ini memperlihatkan adanya komitmen struktural dari level atas yang selaras dengan prinsip *HOT-Fit*, di mana keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh dukungan manajerial dalam penerapannya.

Lebih jauh, dukungan struktural dari pimpinan daerah idealnya diikuti dengan mekanisme evaluasi formal melalui inspektorat atau perangkat pengawasan internal. Evaluasi ini berfungsi sebagai bentuk umpan balik organisasi terhadap teknologi, sekaligus memastikan bahwa SIPD RI tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kondisi di lapangan. Dengan adanya proses pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, implementasi SIPD RI tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan kebijakan pusat, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan praktis organisasi, sehingga penerapan sistem dapat semakin optimal.

b. Environment (Lingkungan)

Faktor lingkungan memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi. Lingkungan ini mencakup regulasi, sumber daya manusia, serta fasilitas pendukung yang tersedia dalam organisasi.

Dari aspek regulasi, penerapan SIPD RI merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Regulasi tersebut diperkuat oleh Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 900.1/KEP.44-BPKAD/1/2024 dan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 900.7140-BPKAD.Set Tahun 2024, yang menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah. Adanya regulasi formal ini menciptakan kepastian hukum sekaligus mendorong organisasi untuk melaksanakan sistem secara konsisten.

Selain faktor regulasi, SIPD RI mendukung kebutuhan tersebut dengan menyederhanakan alur kerja, mempercepat proses pencairan anggaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penerapan SIPD RI tidak hanya bersifat kepatuhan, tetapi juga sebagai kebutuhan praktis organisasi. Berdasarkan teori *HOT-Fit*, kondisi tersebut mencerminkan kesiapan lingkungan organisasi dalam mengadopsi sistem informasi yang dapat menyederhanakan sekaligus mempercepat proses administrasi keuangan. Yusof et al. (2008) menegaskan bahwa lingkungan organisasi yang mendukung adopsi sistem informasi adalah lingkungan yang menuntut peningkatan efisiensi kerja serta penyediaan layanan yang lebih baik.

Dari sisi sumber daya manusia, Bappelitbangda Kota Bekasi memiliki jumlah pegawai yang relatif memadai. Berdasarkan LKIP Tahun (2024), terdapat 102 pegawai dengan mayoritas berpendidikan S1 dan S2. Namun, masih diperlukan tenaga ahli di bidang tertentu seperti informatika, planologi, dan statistik untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan SIPD RI. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas SDM cukup, peningkatan kompetensi teknis tetap menjadi kebutuhan. Berdasarkan teori *HOT-Fit*, hal ini mencerminkan kesiapan organisasi dalam menata lingkungan internal yang mendukung penerapan teknologi informasi, baik melalui penyediaan sumber daya yang memadai maupun pembentukan budaya kerja yang mendukung.

Selain kesiapan dari sisi sumber daya manusia, dukungan fasilitas juga menjadi faktor penting. Tanpa adanya fasilitas pendukung, implementasi kebijakan tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan (Nakii et al., 2023). Informan menyampaikan bahwa pada aspek ini, jaringan dan perangkat kerja yang tersedia di Sub Bagian Keuangan telah cukup mendukung pelaksanaan tugas. Salah satu langkah perbaikan yang dilakukan adalah peningkatan infrastruktur jaringan, dari penggunaan *Wi-Fi* menjadi *LAN*, sehingga akses sistem lebih stabil dan dapat diandalkan.

Meskipun kesiapan dari sisi jumlah SDM dan infrastruktur telah terpenuhi, aspek pemahaman dan motivasi pegawai dalam mengoperasikan SIPD RI masih perlu ditingkatkan agar penggunaan sistem dapat berjalan optimal. Dalam konteks teori *HOT-Fit*, subdimensi lingkungan (*environment*) tidak hanya mencakup kondisi eksternal atau aturan organisasi secara formal, tetapi juga meliputi sikap, persepsi, dan pemahaman pegawai terhadap sistem yang digunakan.

Secara keseluruhan, faktor lingkungan pada penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi telah didukung regulasi yang jelas, ketersediaan SDM, dan fasilitas pendukung yang memadai. Meski demikian, peningkatan kapasitas teknis dan kesadaran pegawai tetap diperlukan agar sistem dapat berfungsi secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

3. Technology (Teknologi)

Teori *HOT-Fit* menjelaskan bahwa dimensi *technology* terdiri atas tiga dimensi, yaitu *system quality* (kualitas sistem), *information quality* (kualitas informasi), dan *service quality* (kualitas layanan).

a. System Quality (Kualitas Sistem)

Kualitas sistem merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas penerapan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kecepatan dan stabilitas akses, kemudahan penggunaan, keterhubungan dengan sistem lain, serta keamanan data.

Dari aspek kecepatan dan stabilitas akses, SIPD RI masih menghadapi kendala karena sangat bergantung pada kondisi jaringan internet dan *server* pusat. Pada saat terjadi lonjakan akses secara bersamaan, sistem cenderung

lambat dan kurang responsif. Berdasarkan teori *HOT-Fit*, kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam responsivitas serta kemampuan sistem dalam mengakomodasi peningkatan jumlah pengguna (skalabilitas). Keterbatasan ini berpotensi menurunkan efektivitas penggunaan, khususnya ketika beban akses sedang tinggi.

Pada aspek kemudahan penggunaan, SIPD RI dinilai cukup mudah dioperasikan oleh pegawai yang sudah berpengalaman dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Namun, bagi pengguna baru, tahap awal penggunaan memerlukan proses adaptasi karena sistem masih memiliki keterbatasan tertentu. Seiring dengan intensitas penggunaan, hambatan tersebut relatif dapat diatasi. Kerangka *HOT-Fit* menegaskan bahwa persepsi pengguna terhadap kemudahan sistem berperan penting dalam membentuk kepuasan pengguna (*user satisfaction*) serta mendorong peningkatan penggunaan sistem (*system use*). Oleh karena itu, dukungan berupa pelatihan dan pendampingan teknis menjadi faktor krusial untuk memastikan proses adaptasi pengguna berjalan optimal.

Pada aspek keterhubungan sistem, SIPD RI belum terintegrasi dengan aplikasi atau sistem lain yang digunakan dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Proses integrasi data masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penyajian data. Ketiadaan interoperabilitas ini menjadi salah satu kelemahan utama dari kualitas sistem, mengingat semakin kompleksnya kebutuhan pengelolaan data lintas sektor dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Dari sisi keamanan, SIPD RI dipandang telah memiliki mekanisme pengendalian yang memadai. Akses terhadap sistem dibatasi hanya untuk pegawai yang memiliki otorisasi, dan pengelolaannya dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menumbuhkan kepercayaan pengguna terhadap perlindungan data yang tersimpan dalam sistem, meskipun belum terdapat penjelasan teknis mengenai enkripsi atau cadangan data. Dalam kerangka *HOT-Fit*, keamanan sistem merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas teknologi yang berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pengguna. Kepercayaan terhadap kemampuan sistem dalam melindungi data menjadi landasan penting bagi keberlanjutan penggunaan teknologi digital, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik yang bersifat sensitif.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas sistem SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi telah memberikan dukungan yang cukup baik terhadap efektivitas penerapan sistem, meskipun masih terdapat keterbatasan terutama pada aspek kecepatan akses, integrasi lintas aplikasi, dan adaptasi pengguna baru. Dalam kerangka *HOT-Fit*, kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas sistem memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan sistem, namun memerlukan penguatan melalui peningkatan infrastruktur jaringan, pengembangan interoperabilitas, serta penyediaan dukungan teknis yang berkesinambungan.

b. Information Quality (Kualitas Informasi)

Kualitas informasi merupakan aspek penting dalam dimensi teknologi pada kerangka *HOT-Fit*. Komponen ini mencakup kemampuan sistem untuk menghasilkan data yang akurat, relevan, tepat waktu, serta mudah dipahami pengguna. Informasi yang berkualitas menjadi prasyarat utama bagi pengambilan keputusan yang efektif, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan oleh SIPD RI pada Bappelitbangda Kota Bekasi dinilai akurat dan sesuai dengan data yang dimasukkan. Namun, keakuratan tersebut sangat bergantung pada ketelitian proses *input*. Hal ini menggambarkan prinsip dasar sistem informasi yang dikenal sebagai *garbage in, garbage out*, yaitu kesalahan pada saat memasukkan data akan berdampak pada kualitas informasi yang dihasilkan (Rochaety, 2017). Dengan demikian, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh rancangan teknologinya, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi dan ketelitian pengguna.

Dari sisi ketepatan waktu, SIPD RI telah mampu menyajikan informasi secara tepat waktu sepanjang tidak terjadi gangguan teknis, seperti kendala pada *server*. Selain itu, ketepatan penyajian informasi juga dipengaruhi oleh kecepatan serta kedisiplinan pengguna dalam melakukan *input* data sesuai jadwal. Artinya, keterlambatan informasi tidak semata-mata disebabkan oleh kinerja sistem, tetapi juga terkait dengan faktor manusia sebagai pengelola. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara dimensi teknologi dan dimensi manusia dalam kerangka *HOT-Fit*.

Sementara itu, SIPD RI juga terbukti mendukung ketepatan siklus perencanaan dan penganggaran. Informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara strategis karena proses input data sudah dimulai sejak tahap perencanaan, bahkan sebelum tahun anggaran berjalan. Kondisi ini mencerminkan kesesuaian antara sistem teknologi dan kebutuhan organisasi, di mana SIPD RI berperan sebagai instrumen yang proaktif dalam mendukung tujuan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Kesesuaian tersebut sejalan dengan prinsip *HOT-Fit* yang menekankan bahwa efektivitas sistem informasi ditentukan oleh sejauh mana teknologi mampu mendukung tujuan serta kebutuhan organisasi secara strategis.

Selain akurasi dan ketepatan waktu, aspek kualitas informasi juga mencakup kemudahan pemahaman oleh pengguna. Tampilan dan penyajian data dalam SIPD RI dinilai cukup jelas, mudah dipahami, serta dapat diakses sesuai kebutuhan pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi standar keterbacaan dan kemudahan pemahaman. Namun demikian, evaluasi berkala tetap diperlukan agar penyajian informasi dapat menyesuaikan dengan tingkat literasi digital serta pemahaman keuangan di berbagai kalangan, sehingga manfaat SIPD RI dapat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

c. Service Quality (Kualitas Layanan)

Dalam kerangka *HOT-Fit*, kualitas layanan mencakup sejauh mana sistem informasi mampu memberikan dukungan teknis maupun non-teknis yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aspek ini meliputi keandalan sistem, ketersediaan

bantuan teknis, kesiapan infrastruktur, serta dukungan organisasi dalam memastikan sistem dapat dimanfaatkan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi pada umumnya dinilai cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan. Secara umum, fitur dan layanan dalam aplikasi telah mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, sejumlah catatan penting muncul terkait keterbatasan sistem, khususnya pada tahap awal implementasi, ketika beberapa fitur masih dalam proses pengembangan dan belum sepenuhnya dapat menjawab seluruh kebutuhan pelaporan keuangan. Berdasarkan teori *HOT-Fit*, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kemampuan sistem dengan kebutuhan pengguna, yang berpotensi memengaruhi efektivitas pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses manajerial serta akuntabilitas keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Dari sisi infrastruktur, mayoritas pengguna menyatakan bahwa perangkat komputer yang digunakan untuk mendukung operasional SIPD RI telah tersedia secara memadai. Bahkan terdapat penambahan perangkat baru untuk menunjang pelaksanaan sistem, yang menunjukkan adanya kesadaran organisasi terhadap pentingnya kesiapan sarana kerja berbasis teknologi. Berdasarkan perspektif teknologi dalam kerangka *HOT-Fit*, ketersediaan perangkat keras yang memadai merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas layanan teknologi informasi. Hal ini mencerminkan upaya organisasi untuk menyesuaikan kapasitas teknologi dengan kebutuhan sistem serta menunjukkan komitmen dalam mendukung operasional SIPD RI secara efektif dan berkelanjutan.

Selain faktor teknis, mekanisme dukungan layanan juga terlihat dari adanya koordinasi lintas unit. Dalam organisasi, komunikasi berperan sebagai sistem yang menghubungkan serta meningkatkan kinerja antar bagian, sehingga tercipta sinergi (Saputra, 2024). Ketika menghadapi kendala, pengguna biasanya melakukan konsultasi dengan BPKAD atau admin internal, serta memanfaatkan media komunikasi informal seperti grup diskusi daring. Pola ini menunjukkan adanya layanan teknis lokal yang cukup responsif, meskipun masih sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah.

Dari perspektif dukungan eksternal, pada tahap awal penerapan SIPD RI, bantuan teknis dari pemerintah pusat, khususnya Kemendagri sebagai pengelola sistem, belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menandakan perlunya peran yang lebih aktif dari pusat, baik dalam hal penyempurnaan sistem maupun penyediaan dukungan teknis berkelanjutan. Selain itu, pelatihan intensif serta dukungan non-teknis seperti insentif atau penghargaan kepada pegawai yang terlibat juga diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan memperkuat kualitas layanan secara keseluruhan. Berdasarkan kerangka *HOT-Fit*, kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan SIPD RI di Bappelitbangda Kota Bekasi telah berkembang secara bertahap dan menunjukkan kemajuan positif. Namun

demikian, kualitas layanan belum sepenuhnya optimal karena masih bergantung pada inisiatif lokal, sementara dukungan struktural dari pusat masih perlu diperkuat. Dengan penguatan sinergi antara tingkat pusat dan daerah, diharapkan kualitas layanan SIPD RI dapat semakin meningkat dan mendukung keberhasilan implementasi sistem secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIPD RI di Sub Bagian Keuangan Bappelitbangda Kota Bekasi secara umum telah berjalan sesuai kerangka *Human–Organization–Technology Fit (HOT-Fit)*. Dari dimensi *human*, sistem sudah menjadi bagian dari rutinitas kerja pegawai, meski tingkat kompetensi dan kepuasan pengguna masih beragam. Dari dimensi *organization*, regulasi dan dukungan struktural telah tersedia, namun variasi motivasi pegawai serta keterbatasan tenaga ahli teknis masih menjadi kendala. Sementara dari dimensi *technology*, sistem mampu menyediakan informasi yang relevan, tetapi kualitas layanan dan stabilitas *server* pusat masih perlu ditingkatkan. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya Bappelitbangda memperkuat program pelatihan teknis berbasis praktik langsung, meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri terkait pemeliharaan *server*, serta memperluas kapasitas infrastruktur lokal agar lebih adaptif terhadap beban pengguna yang tinggi. Selain itu, dibutuhkan penguatan mekanisme *monitoring* internal, sehingga pemanfaatan SIPD RI tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaporan keuangan daerah. Implikasi teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur mengenai penerapan *HOT-Fit framework* dalam konteks penerapan sistem informasi pemerintahan daerah. Studi ini menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti regulasi pusat dan tekanan pemangku kepentingan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sistem, sehingga dapat menjadi perluasan konsep *HOT-Fit* yang umumnya menekankan faktor internal organisasi.

Saran untuk penelitian lanjutan yaitu memperluas kajian ke perangkat daerah lain untuk melihat variasi penerapan SIPD RI antar organisasi, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan metode kuantitatif, misalnya survei tingkat kepuasan pengguna, agar hasilnya lebih terukur dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahady, Y. A., Chatra, E., & Asrinaldi, A. (2025). Dynamics Of Communication and Community Readiness Using The Population Service Application “Dukcapil Ceria Mobile” Disdukcapil Padang Pariaman Regency. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 15–38. <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1015>
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

- Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Bappelitbangda Kota Bekasi. (2024). *LKIP BAPPELITBANGDA 2024*.
- Firdaus, Y. F. H., & Cholik, M. A. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 11(1), 68–78.
<http://ojs.stiami.ac.id>
- Heriyanto. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *Musamus Journal Of Public Administration*. 2022, 4(2), 67–75.
<https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128>
- Manoe, D. S., Koten, Y., & Rozady, M. P. N. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka. *Jurnal In Create*, 9(1).
- Mulyadi, D., & Choliq, A. (2017). Penerapan Metode Human Organization Technology (HOT-Fit Model) untuk Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Persediaan (SIDIA) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Teknologi-Informasi Dan Sains (TeknoIS)*, 7, 1–12.
<https://doi.org/10.36350/jbs.v7i2.23>
- Nakii, S. D., Isa, R., & Nani, Y. N. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8).
<https://doi.org/10.56799/jim.v2i9>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Pramono, K., & Eprilianto, D. F. (2025). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 5(2).
- Rochaety, E. (2017). *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN* (Ketiga). Mitra Wacana Media. www.mitrawacanamedia.com
- Saputra, A. (2024). Efektivitas Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Aparat Desa Tilote Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 46–52. <https://doi.org/10.59713/jipik.v3i1.765>
- Tawar, Santoso, A. F., & Salma, Y. S. (2022). Model HOT FIT dalam Manajemen Sistem Informasi. *Bincang Sains Dan Teknologi*, 1(02), 76–82.
<https://doi.org/10.56741/bst.v1i02.144>
- Triwahyuni, F., & Fatmawati, Y. (2024). Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk Penatausahaan Keuangan di Dinas Cipta Karya, Tata

- Ruang dan Pertahanan Kabupaten Kotawaringin Timur. *Nusantara Hasana Journal*, 4(5), 58–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v4i5.1249>
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Gawe Buku. <https://www.researchgate.net/publication/344211045>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications. Sixth Edition*. SAGE Publications.
- Yusof, M. M., Kuljis, J., Papazafeiropoulou, A., & Stergioulas, L. K. (2008). An Evaluation Framework for Health Information Systems: Human, Organization and Technology-Fit Factors (HOT-Fit). *International Journal of Medical Informatics*, 77, 386–398. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2007.08.004>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 900.1/KEP.44-BPKAD/1/2024 tentang Penggunaan Aplikasi SIPD Kota Bekasi dan SIPD RI dalam Pengelolaan Keuangan Serta Aplikasi Barang Milik Daerah dalam Pengelolaan Aset Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 900.7140-BPKAD.Set Tahun 2024 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam Rangka Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.